

Tinjauan Filsafat Sila Ke-4 Pancasila Terhadap Pilihan Wakil Rakyat Oleh Mahasiswa

Nazlah Aulia

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Korespondensi penulis: aullia505@gmail.com

Abstract. *This research is entitled a “Review of the 4th principle of Pancasila philosophy on the choice of people’s representatives by students” with aims to review the philosophy of the fourth principle of Pancasila, which is democracy, towards the choice of representatives by students. The data collection methods used in this research include literature studies, interviews, and observations of students’ voting behavior towards representatives. The results of this research indicate that students tend to choose representatives who are considered able to represent their voices and interests well. They also choose representatives who have integrity, competence, and good morals in accordance with the values of the fourth principle of Pancasila this research will contribute to a better understanding of how the values of Pancasila, especially the fourth principle, can influence the choice of representatives by students. Furthermore, the results of this research are expected to provide insights for leaders and aspiring leaders to better understand the hopes and needs of students in choosing representatives..*

Keywords: *Philosophy , Pancasila , Student.*

Abstrak. Penelitian ini berjudul “Tinjauan filsafat sila ke-4 pancasila terhadap pilihan wakil rakyat oleh mahasiswa” dengan tujuan untuk meninjau filsafat sila ke-4, yaitu kerakyatan yang dipedomani oleh Pancasila, terhadap pilihan wakil rakyat oleh mahasiswa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, wawancara, dan observasi terhadap perilaku pemilihan wakil rakyat oleh mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memilih wakil rakyat yang dianggap mampu mewakili suara dan kepentingan mereka dengan baik. Mereka juga memilih wakil rakyat yang memiliki integritas, kompetensi, dan akhlak yang baik sesuai dengan nilai-nilai sila ke-empat Pancasila. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Ke-empat, dapat mempengaruhi pilihan wakil rakyat oleh mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemimpin dan calon pemimpin untuk lebih memahami harapan dan kebutuhan mahasiswa dalam pemilihan wakil rakyat.

Kata kunci: Filsafat , Pancasila , Mahasiswa

LATAR BELAKANG

Pancasila, sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia, menjadi panduan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proklamasi kemerdekaan dianggap sebagai penegasan dari ikrar pemuda tahun 1928, yang menegaskan prinsip kemerdekaan dengan fondasi persatuan bangsa, negara tunggal, dan bahasa nasional.

Pancasila terus menjadi topik yang dibahas secara berkelanjutan, terutama dalam penelitian ini yang akan membahas sila keempat. Sila keempat menekankan pada kebijaksanaan dan demokrasi, dengan fokus pada keadilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam proses musyawarah dan perwakilan. Dalam konteks pemilihan wakil rakyat oleh mahasiswa, sila keempat memainkan peran penting dalam menekankan pentingnya

kepemimpinan yang adil dan bijaksana, serta mendorong partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pemilihan wakil rakyat.¹

Demokrasi yang merupakan pencerminan pancasila dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilu sebagai pilihan cara berdemokrasi saat ini. Hal ini berangkat dari beberapa negara yang menganggap bahwa negara yang demokratis adalah negara yang dapat menjadi sarana terpilihnya para wakil rakyat, di mana hal ini menggambarkan suasana demokrasi itu sendiri. Jika ditinjau lebih mendalam sila keempat ini membawa pengaruh dalam memilih wakil rakyat, antaranya pemilihan wakil rakyat harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, memperhatikan visi, misi, dan program calon kerja, wakil rakyat yang terpilih harus mampu mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya, serta mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Dengan demikian sila ke-empat memiliki suatu peran penting dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa/i sebagai rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dan apakah sila ke-empat dari Pancasila Republik Indonesia memiliki peran aktif sebagai landasan dalam pemilihan wakil rakyat oleh mahasiswa/i sebagai generasi muda.

KAJIAN TEORITIS

Filsafat Pancasila

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil dari nilai-nilai yang telah terakumulasi dalam budaya bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang. Nilai-nilai ini telah tumbuh dan berkembang sejak kerajaan Sriwidjaja dan Mojopahit. Filsafat Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang dipelihara sejak zaman dahulu hingga kini, dan akan terus dijaga selama bangsa Indonesia ada.

Secara umum, filsafat Pancasila merupakan hasil dari pemikiran yang mendalam dari bangsa Indonesia. Filsafat ini dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu yang paling benar, adil, bijaksana, terbaik, dan sesuai bagi bangsa Indonesia. Filsafat ini menjadi landasan moral, etika, dan pandangan hidup yang mengikat seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan, keadilan, demokrasi, ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.²

Filsafat politik yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas, khususnya dalam teorinya tentang demokrasi delibratif, menawarkan pandangan teoretis terhadap demokrasi yang

¹ Nerissa,E (2019).Pemaknaan Mahasiswa Terhadap Pancasila Sebagai Identitas Bangsa. Journal Social Change (Vol,2, No.2)

² Pendidikan Moral Dalam Pendidikan Kewarganegaraan,(Malang: Elang Mas 2015),Hal.,11

menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan politik yang berbasis komunikatif. Dalam konsep ini, rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah pembentukan kebijakan politik melalui dialog dan diskusi yang berlangsung secara terbuka dan adil.

Pemikiran Habermas dalam filsafat politiknya sering kali berpusat pada pertanyaan tentang hubungan antara fakta dan norma. Ia mempertanyakan bagaimana negara hukum dan ruang publik dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk harmonisasi kehidupan politik dalam masyarakat yang kompleks seperti saat ini. Hal ini mengacu pada upaya untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan akan legitimasi kebijakan politik dan prinsip-prinsip keadilan dalam lingkungan yang beragam dan dinamis.³

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kebijaksanaan kolektif melalui proses musyawarah dan perwakilan, yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tujuannya adalah untuk menyatukan Indonesia dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Implementasi demokrasi di Indonesia tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan negara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki posisi yang equal dan bersatu padu membentuk demokrasi. Pancasila memiliki peran penting dalam politik, sosial, ekonomi, dan dalam penyelesaian masalah nasional melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang menekankan pada prinsip musyawarah dan mufakat demi kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bangsa dengan ideologi Pancasila, nilai-nilai sila Pancasila harus terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di tingkat negara maupun individu. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mendasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini juga mencakup unsur kesadaran religius, kebenaran, kecintaan, budi pekerti luhur, kepribadian Indonesia, dan keberlanjutan. Dalam demokrasi Pancasila, pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila tidak bersifat mutlak, melainkan harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Cita-cita demokrasi universal dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

³ Aleksandar Jovanoski and Kire Sharlamanov, "Jurgen Habermas and His Contribution To the Theory of Deliberative Democracy," *American International Journal of Social Science Research*, no. August (2021): hlm. 41.

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara keseluruhan, demokrasi Pancasila menempatkan kedaulatan rakyat sebagai inti yang dihayati dan diintegrasikan dengan nilai-nilai lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat persatuan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Asas kekeluargaan dan gotong-royong dalam falsafah Pancasila menegaskan sikap hidup yang berbeda dengan pandangan individualis dan liberalis bangsa-bangsa Barat.⁴

Pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagai momen besar demokrasi di Indonesia. Pemilu harus dijalankan dengan integritas, keadilan, dan kebebasan agar rakyat dapat memilih wakil mereka yang dapat mewakili suara mereka. Melalui proses pemilu ini, rakyat Indonesia dapat menilai visi dan misi dari setiap calon wakil rakyat yang terpilih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan tipe kualitatif yang menggali fakta dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik, serta dampaknya pada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.⁵

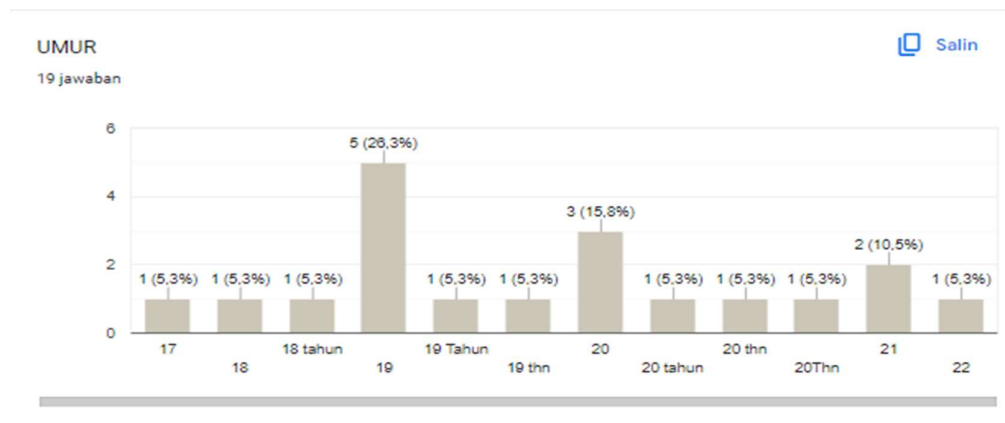
Dengan mengumpulkan data tentang pengalaman masyarakat dalam memilih wakil rakyat berdasarkan sila keempat Pancasila melalui teknik instrument pengumpulan berdasarkan wawancara kepada beberapa responden yang telah terlibat dalam proses pemilihan wakil rakyat, serta melakukan analisis atas data yang didapatkan dari hasil wawancara. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, memilah data, mengelompokkan data dan menarik kesimpulan. Analisis data dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴ Yusdiyanto, Y. (2016). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 10 hari mulai dari tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan 19 Maret 2024 untuk pengumpulan data dari para responden dalam proses pengumpulan peneliti mewawancarai responden dengan menanyakan apa yang menjadi tolak ukur dalam memilih wakil rakyat, tantangan yang didapat ketika menentukan calon wakil rakyat melalui wawancara ini. Data yang dikumpulkan 20 responden yang keseluruhannya adalah mahasiswa mayoritasn rakyat baru pertama kali memilih wakil rakyat.



Gambar 1.1 Diagram Batang Umur Responden

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi tolak ukur mahasiswa dalam memilih calon wakil rakyat, yaitu:

1. Kualitas calon wakil rakyat
2. Partai politik yang mengungsung calon wakil rakyat
3. Progam kerja calon wakil rakyat.

Dari ketiga faktor tersebut, kualitas calon wakil rakyat merupakan faktor yang paling dominan. Mahasiswa menilai bahwa kualitas calon wakil rakyat dapat dilihat dari rekam jejak, pendidikan, dan pengalaman kerja calon wakil rakayat tersebut. Selain itu, mahasiswa juga mempertimbangkan partai politik yang mengusung calon wakil rakyat. Mahasiswa menilai bahwa partai politik yang kredibel dan memiliki platform yang jelas akan mendukung calon wakil rakyat yang berkualitas. Terakhir, mahasiswa juga mempertimbangkan progam kerja calon wakil rakyat. Mahasiswa menilai bahwa progam kerja calon wakil rakyat harus jelas, realistis, dan dapat dilaksanakan. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, mahasiswa kemudian menentukan pilihannya dalam pemilihan wakil rakyat.

Implementasi hukum dalam pemilihan wakil rakyat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti: kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih wakil

rakyat yang berkualitas, adanya praktik politik uang yang mempengaruhi hasil pemilihan, dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan wakil rakyat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan wakil rakyat.

Prinsip Musyawarah dan Mufakat Dalam Penerapan Pemilihan Wakil Rakyat Oleh Mahasiswa

Pemilu merupakan mekanisme demokrasi di mana rakyat menentukan siapa yang akan menduduki jabatan dalam lembaga politik negara, baik itu legislatif maupun eksekutif. Proses pemilu memberikan wewenang kepada warga yang memenuhi syarat untuk memilih secara bebas dan rahasia, mengarahkan dukungannya pada kandidat yang dianggap sesuai dengan aspirasi mereka. Meskipun tidak semua aspirasi dapat terpenuhi, kandidat yang memperoleh suara terbanyak dianggap sebagai pemenang karena mewakili mayoritas atau kehendak rakyat.

Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah mengakui dan menghormati suara mayoritas. Namun, konsep mayoritas dalam demokrasi tidak semata-mata tentang jumlah yang besar secara konstan. Klaim mayoritas yang berdasarkan faktor seperti suku, agama, ras, atau golongan tertentu, bukanlah cerminan dari demokrasi, tetapi lebih merupakan bentuk tirani.

Pemilu juga dianggap sebagai ajang uji publik terhadap visi dan program yang ditawarkan oleh berbagai pihak, baik partai politik maupun individu. Ini merupakan implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat.

Prinsip musyawarah merupakan salah satu landasan dalam penerapan pemilihan wakil rakyat berdasarkan hasil observasi dan wawancara umumnya mahasiswa tidak terlalu memikirkan prinsip musyawarah dalam pemilihan wakil rakyat mereka memilih wakil rakyat hanya berdasarkan dia cocok dan merasa bahwa pemimpin yang dipilihnya kelak dirasa akan mengemban amanah nya dengan baik.

Dampak Penerapan Prinsip Musyawarah dan Mufakat

Penerapan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pemilihan wakil rakyat oleh mahasiswa dapat memiliki dampak yang signifikan, baik bagi proses demokrasi di tingkat kampus maupun dalam konteks lebih luas dalam masyarakat. Berikut beberapa dampaknya

Meningkatkan Partisipasi Demokratis: Dengan menerapkan prinsip musyawarah dan mufakat, mahasiswa akan merasa lebih terlibat dalam proses pemilihan wakil rakyat. Ini akan meningkatkan partisipasi demokratis mereka dan memberikan kesempatan untuk mengambil bagian aktif dalam menentukan arah kepemimpinan.

Membangun Kesepahaman Bersama Musyawarah dan mufakat memungkinkan para mahasiswa untuk mendiskusikan berbagai pandangan dan pemikiran. Ini membantu dalam membangun kesepahaman bersama tentang visi, misi, dan tujuan dari calon wakil rakyat yang mereka pilih.

Menumbuhkan Keterampilan Berdemokrasi Proses musyawarah dan mufakat memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam berpartisipasi dalam proses demokratis. Mereka belajar untuk mendengarkan, berdebat secara terbuka, menghargai perbedaan pendapat, dan mencapai kesepakatan yang bersifat inklusif.

Menghasilkan Pemimpin yang Lebih Responsif: Dengan melibatkan mahasiswa dalam proses musyawarah dan mufakat, pemilihan wakil rakyat akan menghasilkan pemimpin yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mahasiswa. Para wakil rakyat dipilih dengan legitimasi yang kuat, sehingga diharapkan akan lebih peduli terhadap suara mahasiswa.

Memperkuat Prinsip Keadilan dan Kepentingan Bersama: Prinsip musyawarah dan mufakat memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari kesepakatan bersama dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Ini dapat mengurangi konflik dan memperkuat solidaritas di antara mahasiswa serta memperkuat fondasi demokrasi kampus.

Mengingat pentingnya peran wakil rakyat di dalam menjalankan fungsi berdasarkan kewenangannya sebagai legislator sudah seharusnya dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk tindakan kepada rakyat dan konstituen yang memberikan mandat dan memberikan tempat kepada konstituen secara luas dan komprehensif melalui mekanisme yang tepat.

Dengan demikian, penerapan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pemilihan wakil rakyat oleh mahasiswa tidak hanya menghasilkan pemimpin yang lebih demokratis dan responsif, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan masyarakat di tingkat kampus maupun dalam skala yang lebih luas.

Tantangan Mahasiswa Dalam Memilih Wakil Rakyat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mayoritas mahasiswa yang diwawancarai terkendala dalam hal informasi pra pemilihan wakil rakyat para responden mengatakan

“kurangnya sumber informasi untuk mengenal pribadi dan program para caleg. untuk melihat visi misi dan atau informasi mengenai personal branding yg mereka buat. dalam hal ini, saya tadinya berharap akan ada org yg dibayar untuk bikin situs web berisi informasi dan visi misi masing² caleg, entah itu web khusus regional atau pun web nasional dan bisa diakses dengan mudah melalui ponsel pintar yang sudah dimiliki hampir setiap orang”

“Rasa keyakinan dan kehati hatian dalam memilih, karena pastinya ingin menjadikan ekspektasi sesuai dengan realita Sehingga yang membuat saya benar² perang dengan diri sendiri

akan pemilihan ini ialah harus benar2 yakin terhadap yang di pilih dengan penuh kemantapan hati bahwa yang dipilih akan dapat membawakan perubahan baik bagi Indonesia sejahtera”

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam praktiknya, masih sering terjadi ketidaksesuaian antara aspirasi rakyat dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dan penelitian yang mendalam terhadap sila keempat Pancasila. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang merupakan agen perubahan, perlu adanya saran untuk melakukan penelitian wawasan filsafat sila keempat dalam Pancasila terhadap pilihan wakil rakyat.

Adapun penelitian ini dibuat guna memenuhi wawasan yang untuk penulis serta pembaca, demikian saran dari penelitian ialah Pertama, mahasiswa perlu memahami secara mendalam tentang sila keempat Pancasila. Kedua, mahasiswa perlu melakukan penelitian yang mendalam terhadap implementasi sila keempat dalam praktik politik di Indonesia. Ketiga, mahasiswa juga perlu memperhatikan aspek moral dan etika dalam penelitian ini.

Dengan melakukan penelitian filsafat sila keempat dalam Pancasila terhadap pilihan wakil rakyat, diharapkan mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Penelitian ini juga akan membuka wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang sila keempat Pancasila, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pemimpin yang bijaksana dan mampu mewakili kepentingan rakyat secara efektif. Sehingga visi dan misi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat terwujud dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Abdurrahim, A. (2023). PRINSIP PERMUSYAWARATAN DALAM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Azzahra, N. A. S., & Santoso, G. (2023). Filsafat Konten Nasionalisme, Patriotisme, dan Perjuangan Untuk Generasi Z Bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2 (2), 214-226.

Darmawan, R. A., & Najicha, U. UPAYA MENCIPTAKAN PEMILU BERINTEGRITAS DENGAN MENYELARASKAN SILA KE 4 PANCASILA DAN ASAS PEMILU (LUBERJURDIL) DI INDONESIA.

Ghaury, Y. M., Wartisah, W., Julita, D., & Zubair, M. IMPLEMENTASI SILA KE-4 PANCASILA DALAM MEMBENTUK BUDAYA DEMOKRASI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNIVERSITAS MATARAM.

Hariyanto, H. (2014). Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1).

Nahuddin, Y. E. (2017). Pemilihan Umum dalam Sistem Demokrasi Perspektif Sila ke-4 Pancasila. *_Jurnal Cakrawala Hukum_*, 8(2).

Nerissa,E (2019).Pemaknaan Mahasiswa Terhadap Pancasila Sebagai Identitas Bangsa. *Journal Social Change (Vol,2, No.2)*.

Santoso, D. (2023). Diskursus Demokrasi Deliberatif Dalam Membina Hubungan Wakil Rakyat Dan Konstituen Pasca Pemilihan Umum. In *_Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia_ (Vol. 1, No. 4, pp. 184-194)*.

Yusdiyanto, Y. (2016). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *_FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 10_(2)*.